

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agusti, Rosalita Rachma, *Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital* (UB Press, 2022)
- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Tiara Wacana, 2012)
- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2009)
- Andang, S., *Pengantar Ilmu Politik* (Armico, 2001)
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (PT. Eresco, 1995)
- Darussalam, et. al., *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai* (DDTC, 2018)
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (UGM PRESS, 2021)
- Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Sanabil, 2022)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2006)
- Irianto, Edi Slamet dan Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi* (KENCANA, 2022)
- Jalil, Fitri Yani, et. al. *Dasar-Dasar Perpajakan* (Sada Kurnia Pustaka, 2024)
- Manan Bagir, dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (PT. Alumni, 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Prenada Media Group, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2008)
- MD., Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009)
- Mufti, Muslim, *Ekonomi Politik* (CV Pustaka Setia, 2018)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2004)

- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2003)
- Pamuji, Kadar dan Abdul Aziz Nasihuddin, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Universitas Jenderal Soedirman, 2020)
- Pistone, Pasquale, et. al., *Fundamental of Taxation an Introduction to Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration* (IBFD, 2019)
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik* (Ghalia Indonesia, 2006)
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Sinar Baru, 1985)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Ramandey, Lazarus, *Perpajakan Suatu Pengantar* (Deepublish, 2020)
- Raz, Joseph, *The Rule of Law and Its Virtue, in The Authority of Law* (Clarendon Press, 1979)
- Razak, A., dan Elyta. *Ekonomi Politik Antara Teori dan Praktek* (TOP Indonesia, 2018)
- Sandel, Michael, *Justice: What is the Right Thing to Do* (Farrar, Straus, dan Giroux, 2009)
- Sendouw, Recky H. E., et. al., *Administrasi Perpajakan Indonesia* (Eureka Media Aksara, 2023)
- Setiyono, Budi, *Model & Desain Negara Kesejahteraan* (Nuansa Cendekia, 2018)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajagrafindo Persada, 2014)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986)
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum* (PT. Eresco, 1991)
- Sumardjono, Maria S.W., *Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)* (Universitas Gadjah Mada, 2007)
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak* (Sinar Grafika, 2011)
- Winanto, Ahmad, et. al., *Perpajakan Teori Kontemporer* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Tesis, dan Prosiding

Adaresta, Senda Deliani, et. al., “Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)” *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 1, No. 1 (2022)

Adila, Nesria, et.al., “Defisit Anggaran dan Hutang Publik: Dampak Jangka Panjang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” *Journal of Social and Economics Research* 6, Issue 2 (2024): 1025

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 560

Agasie, Deloya dan Rahmi Zubaedah “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional” *Jurnal Perspektif Hukum* 22 Issue 2 (2022)

Agustin, Salsa, et. al., “Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi di Indonesia” *Governance* 12, Issue 2 (2024)

Andriani, Henny, “Partisipasi Bermakna sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang” *Journal of Swara Justitia* 7 No.1 (2023)

Anggini, Rizki, et.al., “Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)” *JPIM* 2, No.1 (2025)

Anggoro, Bayu Dwi, “Telaah Peran Partai Politik untuk mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila” *Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 (2019)

Arif, Asep Fikri Nur dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa terhadap Kesejahteraan Masyarakat” *Humanitas* IV, No. 1 (2022)

Arifah, Yunita Nurul, et.all., “Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2024)

Artioko, Fiqih Rizki, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Al-Qisth Law Review* 6, No. 1 (2022)

- Aryani, Lanastasya dan Maria R.U.D Tambunan “Catatan Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia” *Dialogue* 4 No. 2 (2022)
- Aryanto, Bayu, et.al., “Menggagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” *Rechts Vinding* 10, No. 2 (2021)
- Astuti, Yunni Widhi, “Peran Masyarakat dalam Pembentukan Aturan Hukum” *ELJBN* 1, No. 3 (2023)
- Bujani, Moses, et.al., “Kajian Yuridis Tentang Penetapan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik di Jejaring Sosial” *Lex Privatum* 14, No. 3 (2024)
- Damayanti, Ratna Ayu, Syarifuddin, dan Haerial, “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan di Desa Je’netallasa Kabupaten Gowa” *Jurnal Terapan Abdimas Universitas Hasanuddin*, Vol. 5, No. 2 (2022)
- Dedi, Agus, “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia” *Jurnal MODERAT* 7, No.1 (2021)
- Dirkareshza, Rianda, et.al.,”Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju” *Gorontalo Law Review* 5, No. 2 (2022)
- Dondokambey, Sarah Malena Andrea, et.al., “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah” *Lex Privatum* XI, No. 2 (2023)
- Faturahman, Rizky, “Polarisasi Sebagai Bentuk Efek Negatif dalam Pembentukan Opini Publik pada Pemilihan Presiden 2019” *Interaksi Peradaban* 4, No. 1 (2024)
- Gultom, Yulifar Amin, et. al. “Alternatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Beras” *Jurnalku* 2, No. 4 (2022)
- Hafizd, Jefik Zulfikar, “Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan” *Jurnal IQTISHOD* 3, No. 2 (2024)
- Hajatina dan Uswatun Hasanah, “Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Perilaku Konsumsi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, No. 2 (2024)

- Halilah, Siti dan Muhammad Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli” *Siyasah* 4, No. II (2021)
- Halomoan, Kevin, “Pajak, Pandemi, dan Masyarakat” *Sibatik Jurnal* 1, No 7 (2022)
- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Hermawan, Achmad Denny, “Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap APBN dan Perekonomian Indonesia” *JMA* 2, No. 12 (2024)
- Hoesein, Zainal Arifin, et.al., “Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik dalam Kelembagaan DPR” *AL-Qisth Law Review* 5, No. 1 (2021)
- Imawanto, et.al., “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum* 12, No. 1 (2021)
- John, Jonathan Di, *The Political Economy of Taxation and Tax Reform in Developing Country*, UNU WILDER Research Paper No. 2006/74
- Karyati, Sri, “Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional” *Jurnal Ganec Swara* 16, No. 2 (2022)
- Keladu, Yosef, “Kesamaan Proporsionalitas dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles” *Diskursus* 19, No.1 (2023)
- Kiser, Edgar dan Steven M. Karceski “Political Economy of Taxation” *Annual Reviews Political Science* 20 (2017)
- Kusum, Satria Budi Kusum, et. al., “Hubungan Fungsional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia Menurut UUD 1945” *Jurnal Diskresi* 3, No. 1 (2024)
- Laporan Singkat Komisi XI DPR RI dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- LPEM FEB UI “Macroeconomic Analysis Series, Indonesia Economic Outlook 2025”
- Lubis, Salman Al Habsi, “Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia” *Jurnal Ilmadika* 2, No. 1 (2025)
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi, “Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian dan Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-Meaningful Participation” *Journal of Indonesian Law* 5, No. 2 (2024)

- Matitaputty, Shandy Jannifer, et. al, “Laporan Penelitian Internal Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang 2020
- Media Kemenkeu “Informasi APBN 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
- Meisaya, Azzahra Zaitira, “Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen” *Publishing 1*, No. 2 (2024)
- Milandri, Detti, et. al., “Analisis Dampak Pembatalan Kenaikan Tarif PPN12%: Implikasi terhadap Sektor Ekonomi Mikro dan Pendapatan Negara Indonesia” *Jurhum 2*, No. 1 (2024)
- Murti, Nur Hamidah Pasca dan Nur Salmah, “Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Di tengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM” *JIPP 8*, No. 2 (2022)
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Nasution, Ali Imran, dan Rahmat Bijak Setiawan Sapii, “Aktualisasi Konsep Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Surya Kencana Dua 9*, No. 2 (2022)
- Natalia, dan Icha Fajria, “Analisis Pengaruh Kebaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan” *The and MDP Student Conference 2023 2*, No. 2 (2023)
- Nazra, Wahyu Apriliansyah, “Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum” *OSF Preprints* (2023)
- Podung, Beckham Jufian, “Polarisasi Ideologi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)” *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 2024
- Prakoso, Abdul Rahman, “Pengaruh Kekuatan Sosial dan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi 4*, No. 2 (2022)
- Prasetio, Dicky Eko, dan Hananto Widodo “Ius Constituendum Pengujian Formil dalam Perubahan Konstitusi” *Al-Manhaj 4*, No. 1 (2022)
- Prastyo, Angga, “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Peradilan 11*, No. 3 (2022)

- Pratama, Nur Aji, “Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020” *Jurnal Crepido* 4 No. 2 (2022)
- Puja, Ni Nyoman Asti Irawati, “Pemenuhan Asas Formil dan Asas Materiil dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law” *Jurnal Dinamika Hukum* 24, No. 1 (2023)
- Purba, Bonaraja, et.al., “Asas Kepastian Hukum dalam Perpajakan di Indonesia” *JURMA* 1, No 2 (2023)
- Putra, Lalu Hartawan Mandala, “Redefinisi Makna Partisipasi dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” *ALADALAH* 2, No. 2 (2024)
- Putri, Farreli J S, “Analisis Mengenai Penggolongan dan Sifat Pajak yang Berlaku dalam Sistem Perpajakan di Indonesia” *Research Gate* (2022)
- Putri, Irma Mega, “Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya Terhadap Ekonomi” *JIMEA* 8, No. 2 (2024)
- Putri, Veni Gerhana dan Agus Subandoro, “Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Penjualan Pada PT X” *Jurnal; Revenue* 3 No. 1 Agustus (2022)
- Rabani, Kayla Fatha, et.al. “Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasarm dan Sosial Ekonomi Indonesia” *JISMA* 3, No. 2 (2024)
- Rahim, Abdur, et.al., “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia” *JIIP* 6, No. 8 (2023)
- Rahma, Amanda Aulia, “Peraturan Perpajakan Sebagai Alat Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Indonesia” *ALADALAH* 1, No. 3 (2023)
- Rezkiyanti, Nur Alfiah, et. al., “Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 131 of 2024 on The Increase of Vat By 12% and Its Impact” *INOVASI* 21, No. 1 (2025)
- Ricardo, Maykel dan Maria R. U. D. Tambunan, “Tantangan dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%” *Journal of Economic, Business, and Accounting* 7, No. 5 (2024)
- Riyono, Tio “Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya” *Buletin APBN* VI, Ed. 3 (2021)
- Rohmah, Elva Imeldatur, “Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, Issue 2 (2023)

- Rohmatillah, Arman, et.al., “Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia” *JOSh* 2, No. 2 (2023)
- Rongiyati, Sulasi, “Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Bidang Hukum Info Singkat XIII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2021 (2021)
- Rosa, Nabila Septa, “Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” *Aplikasi Administrasi* 27, No. 1 (2024)
- Rusli, Yohanes Mardinata dan Piter Nainggolan, “Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan” *Pengabdian dan Kewirausahaan* 5, No. 135 (2021)
- Sacramento, Noe John Joseph E. dan Antonio D. Salazar Jr., “Book Review Handbook on Critical Political Economy and Public Policy” review of Handbook on Critical Economy and Public Policy, by Christoph Scherrer, Ana Garcia, dan Joscha Wullweber, *Taylor & Francis*, (2024)
- Sari, Fitri Mustika, et.al., “Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia” *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1 No. 4 (2004)
- Scherrer, Christoph, Ana Garcia, dan Joscha Wullweber, “Handbook on Critical Economy and Public Policy” *Edward Elgar Publishing Limited* (2023)
- Schneider, Marguerite dan Fariborz Damanpour “Public Choice Economics and Public Pension Plan Funding An Empirical Test” *Administration & Society* (2002)
- Seta, Salahudin Tunjung, “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 No. 2 (2020)
- Siswajanthny, Farahdinny, et. al., “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 No. 1 (2024)
- Sushanty, Vera Rimbawani dan Ernawati Horiroh “Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” *Jurnal Legisiasia* 14, No 2 (2022)
- Susilawati, Yani, “Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024” *As-Syifa* 2, No. 2 (2023)
- Sutrisno, et.al., “Systematic Literature Review: Strategi Komunikasi dalam Pemasaran Partai Politik” *Edunomika* 8, No. 1 (2024)

Tarigan, Jaka Subadra, “Analisis Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat Perkotaan” *Circle-Archive* 1, No. 7 (2025)

Tolinggi, Rizkiyani Amelia, et.al., “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal INSANI* 1, No. 2 (2024)

Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, et. al., “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang” *Tatohi* 1, No. 3 (2021)

Wafa, Muhammad Khoirul, “Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang” *Siyasah* 3, No. 1, (2023)

Wijaya, Yudi Yasmin, et. al., “Transparency Regarding the Tax Avoidance in Indonesia: A Philosophical Review” *Lentera Hukum* 7, Issue 1 2020)

Yadisar, A.M., “Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat” *Jurnal UNKA* 22, No. 2 (2024)

Yudistira, Era, et.al., “Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro” *INNOVATIVE* 4, No. 3 (2024)

Zakaria, Erlangga Hamid Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022” *INNOVATIVE* 3, No. 3 (2023)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

D. Gugatan, Ketetapan, Putusan Pengadilan, dan Ikhtisar Putusan Pengadilan

Ketetapan Nomor 69/PUU-XIX/2021, 13 Januari 2022, https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/4b869a99-83e8-445f-a961-2fd9dab9a77f/Putusan%2069_PUU_2021.pdf diakses 7 Agustus 2025

Ikhtisar Putusan Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3448_13_75_Ikhtisar%20-%2014%20PUU%202022.pdf diakses 7 Agustus 2025

Putusan Nomor 19/PUU-XX/2022, 9 Juni 2022, https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/2c9c3da4-9898-486e-9826-fcc4b495e901/Putusan%2019_PUU_2022.pdf diakses 7 Agustus 2025

Ikhtisar Putusan Nomor 19/PUU-XX/2022, 7 Juli 2022, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3454_15_97_IKHTISAR%20PERKARA%2019%20PUU%202022%20UU%20HP_P.pdf diakses 7 Agustus 2025

- Ketetapan Nomor 38/PUU-XXI/2023, 22 Mei 2023,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_90_20_1684991996.pdf diakses 7 Agustus 2025
- Putusan Nomor 83/PUU-XXI/2023, 13 Februari 2024,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_96_09_1707811688.pdf diakses 7 Agustus 2025
- Ketetapan Nomor 149/PUU-XXII/2024, 14 November 2024,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11_245_1731550697.pdf diakses 7 Agustus 2025
- Putusan Nomor 67/PUU-XXI/2023, 12 Desember 2024,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_95_34_1705405574.pdf diakses 7 Agustus 2025
- Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 14/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025, 21 Februari 2025,
https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_4229_8060_Permohonan.pdf diakses 7 Agustus 2025
- Putusan Nomor 1/PUU-XXIII/2025, 19 Maret 2025,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12_525_1745892035.pdf diakses 7 Agustus 2025
- Putusan Nomor 11/PUU-XXIII/2025, 14 Agustus 2025,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13_040_1755159926.pdf diakses 22 Agustus 2025

E. Internet

- “Daya Beli Masyarakat Disinyalir Menurun, Apa Saja Faktornya?” DISPERDAGKOP-UKM diakses pada 10 Juli 2025 <https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id/berita/kategori/berita-nasional/daya-beli-masyarakat-disinyalir-menurun-apa-saja-faktornya>
- “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” Badan Kebijakan Fiskal, diakses pada 25 November 2024
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- “Pembangunan Terus Berlanjut, Preiden Prabowo Setujui Anggaran untuk Pembangunan IKN Tahap Kedua” Ibu Kota Nusantara, diakses 17 Juni 2025
<https://www.ikn.go.id/pembangunan-terus-berlanjut-presiden-prabowo-setujui-anggaran-untuk-pembangunan-ikn-tahap-kedua>

- “Pemerintah Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN” Direktorat Jenderal Pajak diakses pada 23 Juni 2025 <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-aturan-dpp-nilai-lain-dan-besaran-tertentu-ppn>
- “PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas” Direktorat Jenderal Pajak, diakses pada 20 Mei 2025 <https://pajak.go.id/id/artikel/pmk-1312024-tarif-ppn-sebelas-dua-belas>
- “Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang dan Jasa Mewah” Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian diakses 3 Mei 2025 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah#:~:text=Bertempat%20di%20Gedung%20Kementerian%20Keuangan,berlaku%20pada%201%20Januari%202025.>
- “Studi Kasus Penghitungan Pajak atas Belanja Barang Sesuai Aturan PPN Terbaru” Kemenkeu Learning Center, diakses 20 Mei 2025 <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/studi-kasus-penghitungan-pajak-atas-belanja-barang-sesuai-aturan-ppn-terbaru-92f19e78/detail/>
- “The political economy of taxation” UNU WIDER diakses pada 30 November 2024 https://www.google.com/search?q=ekonomi+politik+perpajakan&rlz=1C5CHFA_enID980ID980&oq=ekonomi+poli&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBEEUYOzIGCAAQRRg5MgYIARBFgDsyBggCEEUYPdIBCDQzNjhqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- “The Fed Holds Interest Rates, BI’s Room Narrows” Kompas, diakses pada 15 Juni 2025 <https://www.kompas.id/artikel/en-the-fed-tahan-suku-bunga-ruang-bi-menyempit>
- “TIMING” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, diakses pada 6 Juli 2025 <https://feb.ub.ac.id/timing/>
- “Yang Perlu Anda Tahu tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan” Direktorat Jenderal Pajak, diakses pada 20 Februari 2025 <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Laporan Komisi XI DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang Telah Diselesaikan oleh Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-XI-DPR-RI-terhadap-RUU-tentang-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-1633596532.pdf>

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diakses melalui <https://drive.google.com/file/d/1rVaHSYiadV7j43ETHTSgN7waTz36dMgY/view>

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang Undang Pada Mahkamah Konstitusi diakses melalui <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>